

PENDAHULUAN

Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan perusahaan (*sustainability corporate*), perusahaan membuat laporan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Laporan pertanggungjawaban ini biasa disebut dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure*). CSR merupakan suatu upaya tanggung jawab perusahaan atau organisasi atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil oleh perusahaan atau organisasi tersebut, dimana dampaknya akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan lingkungan. Menurut Suharto (2009) menyatakan bahwa CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasarkan pada 3 aspek dasar yaitu mencari laba, mensejahterakan orang/sosial serta menjamin keberlangsungan lingkungan. Jadi dalam hal ini perusahaan tidak hanya berfokus pada segi keuangan saja, melainkan juga memperhatikan sosial dan lingkungan.

Sosial dan lingkungan sangat menentukan, karena jika terabaikan maka akan terjadi kerusakan alam/lingkungan yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan, baik secara finansial perusahaan maupun tekanan dari masyarakat dan mendapat sanksi dari pihak berwenang. Hal ini akan membuat citra/*image* perusahaan menjadi buruk sehingga para investor pun akan berfikir ulang, bahkan tidak akan tertarik dengan perusahaan tersebut. Untuk itu perusahaan harus mampu menyeimbangkan dari berbagai aspek tersebut sehingga mendapat dukungan serta pengakuan masyarakat (Dowling dan Pfeffer, 1975).

Perusahaan mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI).

Dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik, selain pengungkapan CSR, perusahaan juga harus memenuhi tuntutan penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Jadi, GCG adalah suatu aturan yang mengarahkan semua elemen perusahaan untuk berjalan bersama-sama guna mencapai tujuan perusahaan (Bukhori *et al.*, 2011). GCG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi konsumen, *stakeholders*, pemasok, pemerintah, lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut. Disamping itu, dengan konsep GCG mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan konsep GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mendongkrak harga saham dan citra perusahaan, dan menaikkan kredibilitas perusahaan. GCG sangat berkaitan dengan CSR. Tata kelola yang baik (GCG), salah satunya dapat diwujudkan dengan menerapkan tanggung jawab sosial (CSR). Jadi, pengungkapan CSR dan penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh *Corporate Social Governance* (CSR) dan GCG terhadap kinerja keuangan, diantaranya adalah Ajilaksana (2011) yang melakukan penelitian berjudul pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan, dan hasilnya adalah CSR secara parsial (dalam aspek sosial) berpengaruh positif terhadap Asset TurnOver (ATO), secara simultan CSR berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang *Market to Book Ratio*. Penelitian Cahyono (2011) tentang pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur di BEI, menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap ROE sebagai kinerja keuangan. Selanjutnya menurut penelitian Indrawan (2011) yang berjudul pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa pada hipotesis pertama ditemukan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan variabel kontrol *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE), dan variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi variabel kesempatan pertumbuhan (*growth*) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pada hipotesis kedua ditemukan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* dan variabel kontrol risiko sekuritas (*beta*) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pasar (CAR), dan tiga variabel kontrol lainnya (*leverage*, *size*, dan *growth*) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pasar, akan tetapi variabel *unexpected earnings* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pasar.

Penelitian yang dilakukan Husnan (2013) yang berjudul pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2008-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Return on Sales* (ROS) tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE) dan *Current Rasio*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yaparto (2013) sedikit berbeda dengan Husnan (2013) dimana hasilnya menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Kemudian Hafidzah (2013) melakukan penelitian berjudul pengaruh CSR dan GCG terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2008-2012. Hasil menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan variabel GCG: kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, hanya komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rahardjo (2014) menganalisis pengaruh CSR dan karakteristik GCG terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan CSR menggunakan pedoman G3 yang terdiri dari 79 item, sedangkan karakteristik GCG meliputi: ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Untuk kinerja perusahaan diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Objek penelitiannya pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2012. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif pada CSR,

ukuran dewan direksi, komite audit dengan kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tentang CSR masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka perlu dilakukan penelitian lagi dengan perusahaan selain manufaktur dan memperpanjang tahun pengamatan yaitu dari tahun 2013-2015 untuk menguji CSR dengan tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate social Responsibility* (CSR) dan karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga melanjutkan dari penelitian Nugroho dan Rahardjo (2014) yang melakukan pengungkapan CSR menggunakan pedoman G3 yang terdiri dari 79 item meliputi: kinerja ekonomi 9 item, kinerja lingkungan 30 item, tenaga kerja 14 item, HAM 9 item, sosial masyarakat 8 item, serta tanggung jawab produk 9 item. Kinerja perusahaan diukur dengan ROE. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pedoman G4 yang terdiri dari 91 item meliputi: kinerja ekonomi 9 item, kinerja lingkungan 34 item, tenaga kerja 16 item, HAM 12 item, sosial masyarakat 11 item, serta tanggung jawab produk 9 item. Kelebihan G4 dari G3 adalah penambahan 11 item pada kinerja lingkungan 4 item, tenaga kerja 2 item, HAM 3 item, serta sosial masyarakat 3 item.

Perusahaan yang menekankan kepedulian pada lingkungan, tenaga kerja, HAM serta sosial masyarakat akan lebih mendapat dukungan serta simpati selain dari karyawan, juga lingkungan masyarakatnya. Hal ini akan menciptakan *image* yang baik terhadap perusahaan, sehingga berpengaruh selain dari karyawan yang semakin termotivasi dalam bekerja, juga berpengaruh terhadap para investor untuk menanam modalnya sehingga akan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Untuk pengukuran kinerja perusahaan, penulis akan menggunakan *Return On Equity* (ROE) dan memperpanjang tahun pengamatan dari tahun 2013-2015, serta menggunakan perusahaan pertambangan di BEI.

Alasan penulis mengambil perusahaan pertambangan karena sektor pertambangan memegang kendali dalam sektor perekonomian seperti tambang minyak yang merupakan kebutuhan pokok, sektor ini memiliki nilai kapitalisasi yang cukup besar dibanding sektor lain, sehingga membuat sektor pertambangan

ini diminati oleh para investor saat ini (Siagian, 2013). Dengan naiknya harga minyak mentah dunia, batubara menjadi sumber energi utama dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan batubara sehingga pendapatan perusahaan meningkat, meskipun tahun 2015 merupakan tahun terburuk bagi sektor pertambangan. Dalam Laporan ke-13 dari rangkaian laporan Industri PwC seperti yang diterima oleh Majalah Tambang 40, perusahaan pertambangan global terbesar mencatat kerugian bersih kolektif (US\$27 miliar). Ini merupakan yang pertama dalam sejarah di mana kapitalisasi pasar turun sebesar 37%. Dan lebih dari itu penurunan ini bahkan telah secara efektif menghapus keuntungan yang diperoleh selama siklus super komoditas (www.pwc.com).

Menurut Jock O'Callaghan, Global Mining leader di PwC mengatakan tak diragukan lagi, tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan bagi sektor pertambangan, adanya penurunan harga komoditas sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini yang mendorong perusahaan pertambangan harus berupaya keras meningkatkan produktivitas, beberapa di antaranya berjuang untuk bertahan, diikuti dengan pelepasan aset atau penutupan usaha. Pemegang saham pun bersikeras untuk berfokus pada jangka pendek, yang berdampak pada ketersediaan modal untuk diinvestasikan dan mengakibatkan terbatasnya opsi untuk pertumbuhan. Meskipun demikian, menurut Jock bahwa industri yang tangguh itu walaupun perusahaan sedang mengalami penurunan, namun mereka masih bisa bertahan bahkan meningkat pendapatannya (www.pwc.com). Perusahaan pertambangan di Indonesia yang mengalami peningkatan pendapatan yaitu PT. Bara Jaya Internasional. Tbk dan PT. Mitrabara Adiperdana. Tbk. Pada perusahaan Bara Jaya Internasional mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13,04 triliun di tahun 2013, kemudian meningkat labanya 4x lipat di tahun 2014 sebesar Rp 52,94 triliun, dan tahun 2015 membukukan labanya sebesar Rp 61,55 triliun. Demikian juga pada perusahaan Mitrabara Adiperdana Tbk, pada tahun 2013 membukukan laba sebesar \$ 3.544.666, kemudian meningkat 4x lipat di tahun 2014 sebesar \$ 13.927.059, dan tahun 2015 meningkat menjadi \$ 34.663.066 (Data laporan keuangan BEI, 2013-2015).

Batubara merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan baku pokok produksi baja dan semen. Meskipun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil (terutama batubara) akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga batubara terus menjadi sumber energi vital. Kendati begitu, teknologi batubara bersih dalam pertambangan batubara akan sangat diperlukan di masa mendatang (sebagian karena faktor komersil) dan Indonesia diharapkan akan terlibat secara aktif di dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang terkait dengan pertambangan batubara, seperti pengembangan waduk-waduk coalbed methane (CBM) yang potensinya banyak dimiliki oleh Indonesia, telah mulai mendapatkan perhatian belakangan ini (www.indonesia-investments.com, 2016).

Selain itu, hubungannya dengan CSR sektor pertambangan memiliki resiko yang lebih besar terhadap kesehatan bahkan keselamatan jiwa karyawan dan lingkungan, contohnya batubara merupakan sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon, sehingga bagi perusahaan yang lebih memperhatikan karyawannya akan mendapat dukungan penuh dari karyawan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Demikian juga perusahaan yang memperhatikan lingkungan akan mendapatkan dukungan masyarakat karena bisa berempati sehingga terjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan hal ini akan membuat perusahaan sustainable di masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau informasi referensi tentang penggunaan G4 untuk pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan, serta mengetahui pengaruh dari komponen GCG (ukuran dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit) terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Bagi perusahaan dapat memberikan informasi kelebihan penggunaan G4 dalam pengungkapan CSR, sehingga

perusahaan dapat menyempurnakan pengelolaan perusahaannya agar tercipta keberlangsungan (*sustainability*). Bagi pihak yang berkepentingan seperti investor dapat memberikan informasi tentang keadaan perusahaan yang banyak melakukan kegiatan CSR dan perusahaan yang mengimplementasikan GCG, sehingga tidak salah dalam berinvestasi.



KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

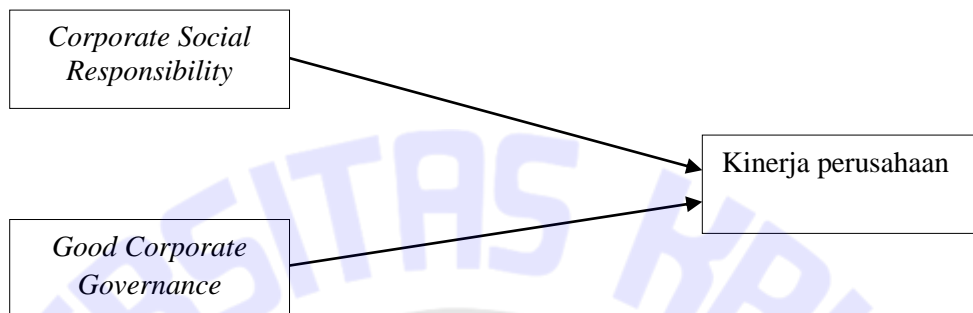
Dalam menetapkan strategi perusahaan, kinerja keuangan menjadi sumber pertimbangan yang penting karena memberi manfaat bagi *stakeholders*. Kinerja keuangan juga berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi di suatu perusahaan. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam memahami konsep GCG dapat digunakan teori dasar hubungan keagenan, yang merupakan hubungan dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *agent* dan pihak lain bertindak sebagai *principal*. Hubungan ini muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan tugas dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Dalam hubungan keagenan terdapat konflik kepentingan antara pemilik dan agen dimungkinkan karena agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan, adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak untuk mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ibrahim, 2007).

Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan terjadi karena perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007). Sebagai agen, secara moral manajer bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, masing-masing pihak berusaha mempertahankan atau bahkan mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Waryanto, 2010). Selain itu, teori ini juga dapat menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi, yaitu ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh manajer sebagai pengelola perusahaan kepada pemilik (pemegang saham) terhadap kondisi perusahaan yang sebenarnya. Karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak daripada

pemegang saham, maka kecenderungan manajer untuk berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadi semakin meningkat, sehingga membuat perusahaan harus menanggung biaya keagenan yang meliputi: biaya monitoring, bonding, dan kerugian residual (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk itu diperlukan pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan, yaitu dengan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Diharapkan dengan mekanisme GCG dapat mengurangi konflik kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan dan mengurangi biaya keagenan (Ibrahim, 2007). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Herawati (2008), yaitu GCG menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham. Informasi atas implementasi GCG akan menambah kepercayaan investor terhadap informasi keuangan perusahaan dalam laporan tahunan. Perusahaan dengan sistem tata kelola yang baik dapat menyediakan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan kreditur, bahwa investasi yang ditanamkan akan memperoleh pengembalian yang wajar dan menguntungkan.

Bagian dari implementasi keterbukaan dan tanggung jawab dalam *Good Corporate Governance* diwujudkan nyata dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Menurut World Business Council in Sustainable Development, *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal/setempat dan masyarakat luas. Pernyataan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mementingkan pencapaian profit tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan. Ketika kondisi sosial dan lingkungan terabaikan maka akan menurunkan citra/*image* masyarakat terhadap perusahaan, banyak sanksi dari pihak berwenang karena kerusakan lingkungan, serta menurunnya minat investor untuk berinvestasi, dan imbasnya kondisi keuangan perusahaan memburuk. Jadi secara signifikan dengan pengungkapan CSR mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan

landasan teori tersebut dan penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual

Dari diagram kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) dapat dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Penelitian ini menggunakan ROE karena ROE merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. ROE dapat memberikan gambaran mengenai tiga hal pokok yaitu: a) kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba , b) efisiensi perusahaan dalam mengelola asset, dan c) utang yang dipakai dalam melakukan usaha. Hasil dari ekuitas (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas (Indrawan, 2011). GCG merupakan tata kelola internal perusahaan, sedangkan CSR merupakan perwujudan nyata tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan perwujudan mekanisme tata kelola yang baik sehingga dapat mempengaruhi keputusan investor untuk pengambilan keputusan investasi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Perusahaan

CSR merupakan upaya tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil dan dilakukan oleh perusahaan, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh pihak-pihak terkait termasuk lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang melakukan aktivitas CSR secara berkala, tentunya akan membuat kesan positif bagi perusahaan dalam jangka panjang (Davis,1973). Dalam hal ini perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi perusahaan juga meningkat di mata masyarakat, jadi masyarakat akan berkeinginan membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan di pasaran maka laba perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya laba maka akan menarik investor karena profitabilitas menjadi pertimbangan penting investor dalam keputusan investasi (Kusumadilaga, 2010). Dalam hal ini , perusahaan yang melakukan CSR di tahun 2013 akan diungkapkan di tahun 2013 sebagai laporan tahunan, dan dilihat oleh pasar atau masarakat pada tahun 2014. Saat perusahaan melakukan CSR maka akan dilihat oleh pasar, sehingga pasar akan merespon dengan membeli produk – produk perusahaan pertambangan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Disamping itu, perusahaan yang menjalankan CSR terhadap karyawan ataupun lingkungan, akan mendapat dukungan penuh dari karyawan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini menguntungkan perusahaan karena mendapat dukungan penuh karyawan untuk memajukan perusahaan. Demikian juga mendapat dukungan dari lingkungan, tercipta image yang baik, sehingga terjaga keberlangsungan perusahaan. Jadi perusahaan tidak hanya mementingkan keuangan saja, tetapi memperhatikan sosial masyarakat dan lingkungan, sehingga selain membuat *image* perusahaan bagus juga akan menambah investor dan akan memperkuat keuangan perusahaan (Anggraini, 2006).Hal ini yang membuat kinerja perusahaan meningkat, karena kesejahteraan perusahaan itu dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Jadi, jika kondisi keuangan perusahaan bagus berarti pengelolaan perusahaan tersebut baik, sehingga keberadaan perusahaan diakui masyarakat, mendapat dukungan penuh karyawan dan lingkungan, maka tercipta keberlanjutan

perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2011), Nugroho dan Rahardjo (2014) menemukan bukti bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE), Husnan (2013) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROS). Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan

GCG merupakan tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dengan baik atau menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*). Dengan adanya mekanisme GCG, maka tindakan kecurangan yang dilakukan agen dapat diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Prinsip-prinsip GCG yang harus dijalankan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran atau kesetaraan. GCG akan bermanfaat bagi perusahaan jika diterapkan secara konsisten. Manfaat penerapan GCG antara lain: kinerja perusahaan terus membaik, mendongkrak harga saham dan citra perusahaan, menaikkan kredibilitas perusahaan, baik dimata investor, mitra, atau kreditor dan *stakeholders* lainnya (Wibisono, 2013). Dalam penelitian ini, mekanisme GCG akan diprosikan dengan variabel ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Dewan Direksi adalah dewan manajemen yang bertugas mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarah dan pengawasan dewan komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007, dijelaskan bahwa Dewan Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan, sehingga jika hanya terdapat seorang Dewan Direksi, maka orang

tersebutlah yang harus mewakili perusahaan baik urusan yang ada di luar maupun di dalam perusahaan. Namun, jika jumlah Dewan Direksi lebih dari satu orang, maka akan jelas pembagian tugas dari masing masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi para *stakeholder* (Nugroho dan Rahardjo, 2014). Disamping itu, jika jumlah dewan direksinya lebih dari satu maka setiap anggotanya dapat menjadi pengawas terhadap satu dengan yang lainnya, meskipun di prakteknya fungsi pengawasan melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian tersebut, maka masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab apabila terjadi tindakan yang merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin jumlah dewan direksinya minim. Dengan meningkatnya dewan direksi sesuai karakteristik perusahaan (Undang-Undang), maka pembagian tugas pengawasan intern perusahaan terjaga, saling kesinambungan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian (kinerja perusahaan meningkat). Kemudian hubungannya dengan pengawasan eksternal perusahaan, maka semakin banyak anggota Dewan Direksi, akan membuat lebih banyak jaringan dengan pihak *eksternal* yang akan memberikan *image* yang baik bagi perusahaan sehingga menarik para investor untuk menanamkan modal, dimana modal perusahaan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat. Ukuran Dewan Direksi yang ideal, tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan (Wardhani, 2006). Berdasarkan pasal 92 ayat 3 Undang -Undang Perseroan Terbatas no. 40, perseroan yang kegiatan usahanya bersifat umum boleh terdiri satu orang saja anggota direksinya atau boleh lebih dari 1 orang. Pada ayat 4 ditentukan secara imperatif jumlah anggota direksi bagi perseroan tertentu, minimal 2 orang yaitu pada perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan

direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE). Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2= Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Dewan Komisaris merupakan dewan pengawas yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan, tetapi tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 3 menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris terdiri atas 1 orang atau lebih, dan pada ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Nugroho dan Rahardjo, 2014). Semakin banyak anggota Dewan Komisaris, maka pengawasan terhadap Dewan Direksi menjadi lebih baik, karena akan banyak masukan yang didapat dan bervariasi sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR, hal ini akan meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Hafidzah (2013) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggung jawab pada tiga bidang yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan. Menurut KNKG, dijelaskan bahwa Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa: (i)

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standart audit yang berlaku, (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Menurut Undang -Undang Republik Indonesia no. 19 tahun 2003 (bagi BUMN) serta keputusan ketua Bapepam No: Kep-41/PM/2003 (bagi perusahaan publik) menyatakan komite audit sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai seorang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang eksternal yang independen serta memiliki dan menguasai latar belakang akuntansi keuangan. Menurut *Sarbanes-Oxley act* yang dikutip Sutojo dan Aldridge (2005) dalam Mulyati (2011) menyatakan jumlah anggota komite audit perusahaan mengharuskan 5 orang, diangkat dengan masa jabatan 5 tahun dan memiliki pengetahuan dasar manajemen keuangan. Dengan semakin banyaknya anggota Komite Audit maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalkan upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian Mulyati (2011), Nugroho dan Rahardjo (2014) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE). Maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H4 = Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 yang tersedia di www.idx.co.id. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Perusahaan mempublikasikan *annual report* dan data tentang *Corporate Governance*, khususnya memuat informasi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, serta ukuran komite audit. Selain itu, perusahaan mempublikasikan data keuangan lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2013-2015.
- b) Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember.
- c) Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif dan tidak mengalami kerugian, karena berpengaruh pada ROE.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Suryana, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan, yang diukur menggunakan ROE. Menurut Dewi dan Widagdo (2012), ROE diukur dari laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG). Pengungkapan CSR menggunakan *check list* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) 4. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan adalah sebanyak 91 item, yang meliputi: indikator kinerja ekonomi (9 item), indikator kinerja lingkungan (34 item), indikator kinerja sosial yang terdiri atas tenaga kerja (16 item), hak asasi manusia (12 item), masyarakat (11 item), tanggung jawab produk (9 item). Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check*

list dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item *i* diungkapkan maka diberikan nilai 1, namun jika item *i* tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan serta mencocokkan pada *check list*, maka hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan setiap tahunnya dihitung indeksnya dengan membagi jumlah item yang diungkapkan suatu perusahaan dengan jumlah item GRI 4 (91 item). Untuk karakteristik GCG menggunakan ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Menurut Dewi dan Widagdo (2012) ukuran dewan direksi sama dengan jumlah seluruh anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberi manfaat bagi perusahaan karena tercipta jaringan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pearce dan Zahra, 1992). Untuk ukuran dewan komisaris ataupun komite audit sama dengan jumlah dari seluruh anggota dewan komisaris ataupun komite audit dalam suatu perusahaan (Dewi dan Widagdo, 2012). Menurut Chtourou *et al* (2001) menyatakan bahwa apabila jumlah dewan komisaris semakin besar maka mekanisme monitoring perusahaan akan semakin baik, jadi jumlah dewan komisaris yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Ukuran komite audit merupakan suatu karakteristik yang mendukung kinerja komite audit dalam suatu perusahaan, maka ukuran komite audit yang semakin besar akan semakin baik perusahaan karena pengawasannya maksimal (Nugroho dan Rahardjo, 2014).

Tahapan Analisis

Data yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dengan melihat nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis, H_0 : data residual terdistribusi normal, sedangkan H_a : data residual tidak terdistribusi normal. Jadi jika nilai signifikansi uji K-S bernilai signifikan atau $\alpha_{max} > D_{tabel}$

maka H_0 ditolak, yang berarti data residual tidak terdistribusi secara normal. Tetapi jika nilai signifikansi uji K-S bernilai tidak signifikan atau $a_{\max} \leq D_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima, yang berarti data residual terdistribusi secara normal (Ghozali, 2009).

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Gujarati, 2003). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas, menurut Hair *et al* (1995) dalam Ghozali (2009) adalah mempunyai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan mempunyai angka *tolerance* $> 0,1$. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara error term (kesalahan pengganggu) pada data time series (Ghozali, 2009). Gangguan autokorelasi ini dapat menyebabkan parameter hasil estimasi tidak lagi memiliki standart error yang minimum sehingga pengujian hipotesis yang menggunakan standar error yang tidak minimum tersebut bisa memberikan hasil yang tidak tepat. Uji autokorelasi ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW *test*) dari program SPSS. Uji Durbin Watson banyak digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas. Pengambilan keputusan untuk autokorelasi dapat dilihat dengan beberapa kriteria Santoso (2010): (1) Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, (2) Angka DW berada diantara -2 sampai dengan 2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. Untuk uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White . Uji White di lakukan dengan meregresi nilai residu kuadrat (e^2) terhadap variabel bebas (Gujarti , 2003). Model tidak mengandung heteroskedastisitas apabila tidak ada variabel yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, nilai absolute U_t dan probabilitas signifikansi $> 0,05$ atau 5%.

Kemudian dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis *multiple regression* (regresi berganda) untuk menganalisis hubungan antara variabel *independent* dengan *dependent*. Analisis regresi linear berganda ini diolah dengan

program SPSS. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis mengacu pada penelitian Nugroho dan Rahardjo (2014) yaitu:

$$\text{ROE} = \beta_0 + \beta_1 \text{CSR} + \beta_2 \text{UDD} + \beta_3 \text{UDK} + \beta_4 \text{KA} + \varepsilon$$

Keterangan:

ROE	= <i>Return On Equity</i>
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
CSR	= <i>Corporate Social Responsibility</i>
UDD	= Ukuran Dewan Direksi
UDK	= Ukuran Dewan Komisaris
KA	= Komite Audit
ε	= <i>error</i> (kesalahan pengganggu)

Koefisien determinasi (*Adjust R Squared*) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependennya, dimana nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 (Ghozali, 2009). Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR dengan penggunaan G4 terhadap kinerja keuangan perusahaan serta mengetahui pengaruh komponen GCG (ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit) terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI periode 2013-2015. Berdasarkan data dari BEI melalui situsnya www.idx.co.id dan data dari *Indonesia Capital Market Direktory* (ICMD) 2013 bahwa perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI sebanyak 43 perusahaan. Dari jumlah tersebut hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan (data perusahaan terlampir). Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 2013-2015, sehingga jumlah laporan tahunan yang diobservasi sebanyak 51 laporan tahunan (*annual report*). Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai berikut:.

Tabel 1. Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah perusahaan pertambangan yang melaporkan <i>annual report</i> tahun 2013-2015 di BEI.	43
2	Jumlah perusahaan pertambangan dengan <i>annual report</i> yang tidak sesuai dengan kriteria sampel.	(26)
3	Jumlah perusahaan pertambangan yang sesuai dengan kriteria sampel.	17

Sumber: data yang telah diolah. Untuk sampel perusahaan terlampir.

Pada penelitian ini variabel terikat menggunakan ROE sebagai pengukuran kinerja perusahaan, sedangkan variabel bebas adalah CSR, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI dan ICMD.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan variabel penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, Analisis statistik deskriptif ini meliputi: rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2009). Hasil uji analisis deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Standar Devisiasi
Indeks Corporate Social Responsibility	51	0,462	0,934	0,74533	0,143402
Dewan Direksi	51	3	8	4,98	1,208
Dewan Komisaris	51	2	10	4,86	2,191
Komite Audit	51	2	4	3,12	0,475
Return On Equity	51	0,006	0,469	0,12155	0,103348
Valid N (listwise)	51				

Sumber : data sekunder yang diolah , 2016

Pada tabel 2 menunjukkan data analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 51 laporan tahunan dari 17 perusahaan. Untuk variabel ROE menunjukkan rata-rata 0,12155 atau 12,155 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel rata-rata mampu mendapatkan laba bersih sebesar 12,155 % dibanding dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai ROE dari seluruh perusahaan sampel cukup bervariasi ditunjukkan dengan nilai standar deviasi ROE sebesar 10,3348% dengan nilai minimum 0,6 % dan nilai maksimum 46,9%.

CSR merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Indeks pengungkapan CSR diukur dengan GRI 4 (G4) menunjukkan rata-rata 74,533%. Hal ini berarti dalam 3 periode laporan tahunan, perusahaan telah mengungkapkan rata-rata sebanyak 74,533% dari total item maksimal (91 item) yang diungkapkan mengenai CSR, yang berarti total item rata-ratanya adalah 67 item. Indeks pengungkapan CSR terkecil sebesar 46,2% yang berarti masih ada perusahaan yang mengungkapkan dibawah rata-rata bahkan kurang dari setengah

pengungkapan total item maksimal, namun ada juga yang melebihi rata-rata yaitu maksimal 93,4%. Nilai standar deviasi 14,3402% menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dari perusahaan sampel masih memiliki variasi yang cukup rendah. Untuk variabel independen lainnya adalah ukuran dewan direksi yang rata-ratanya 4,98 atau sebanyak 5 orang, dengan jumlah minimal 3 orang dan maksimal 8 orang. Hal ini sesuai pasal 92 ayat 4 Undang – Undang Perseroan Terbatas no. 40 yaitu minimal 2 orang untuk jumlah dewan direksi pada perusahaan perseroan. Nilai standar deviasi ukuran dewan direksi 1,208. Nilai tersebut relatif kecil dibanding nilai rata-rata ukuran dewan direksi dari perusahaan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi masih memiliki variasi yang relatif kecil.

Variabel independen lainnya adalah ukuran dewan komisaris. Dari tabel 2 ditunjukkan rata-rata dewan komisarisnya adalah 4,86 atau sebanyak 5 orang, dengan jumlah minimal 2 orang dan maksimal 10 orang. Hal ini berarti sesuai dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 3 yang menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris terdiri atas 1 orang atau lebih, dan pada ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota dewan komisaris. Standar deviasi ukuran dewan komisaris menunjukkan angka 2,191 yang berarti bahwa variasi ukuran dewan komisaris masih relatif kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata ukuran dewan komisaris dari perusahaan sampel. Untuk variabel komite audit menunjukkan rata-rata 3,12 atau sebanyak 3 orang, dengan jumlah minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia no. 19 tahun 2003 (bagi BUMN) serta keputusan ketua Bapepam No: Kep-41/PM/2003 (bagi perusahaan publik) menyatakan komite audit sedikitnya terdiri dari 3 orang. Standar deviasi komite audit menunjukkan 0,475 yang berarti bahwa variasi komite audit masih relatif kecil dibanding dengan nilai rata-rata ukuran komite audit dari jumlah perusahaan sampel.

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, serta uji heteroskedastisitas).

Uji determinasi (R^2) menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,578 atau 57,8%. Hal ini berarti bahwa 57,8% variabel terikat ROE dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel bebas yaitu ukuran dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit, sedangkan 42,2% variabel ROE dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan secara simultan adanya pengaruh variabel bebas (CSRi, UDD, UDK, KA) terhadap variabel terikat (ROE), dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Uji F & Uji Determinasi (R^2)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig	R	R Square	Adjusted R Square
Regression	0,327	4	0,082	18,101	0,000 ^a	0,782 ^a	0,612	0,578
Residual	0,207	46	0,005					
Total	0,534	50						

Sumber : Data Sekunder yang diolah , 2016

Dari tabel 3 ditunjukkan bahwa nilai $F= 18,101$ dengan probabilitas sebesar $0,000^a$. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari $0,05$ menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (CSRi, DD, DK, serta KA) mempengaruhi variabel terikat (ROE).

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (CSR, DD, DK, KA) terhadap variabel dependen (ROE). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi), jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4 seperti berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized		Standardize	t	Sig.
	Coefficients		d		
	B	Std .error	Beta		
Konstanta	-380	0,084		-4,533	0,000
Indeks Corporate Social Responsibility	0,602	0,083	0,836	7,252	0,000
Dewan Direksi	0,028	0,010	0,326	2,667	0,011
Dewan Komisaris	-0,029	0,006	-0,615	-5,158	0,000
Komite Audit	0,018	0,024	0,081	0,718	0,476

Sumber :Data Sekunder yang diolah , 2016

Regresi linier berganda digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh CSR, ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja perusahaan (ROE), dapat dilihat dari koefisien nilai β pada tabel 4, sehingga dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$ROE = -0,380 + 0,602 \text{ CSR} + 0,028 \text{ UDD} - 0,029 \text{ UDK} + 0,018 \text{ KA} + \varepsilon$$

Uji t dapat ditunjukkan dari nilai probabilitas t atau sig. < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Dari tabel 4 ditunjukkan hipotesis pertama untuk CSR (sig. 0.000 < 0,05) yang berarti variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Indrawan (2011), Husnan (2013), serta Nugroho dan Rahardjo (2014) yang menemukan bukti bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE). Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa untuk Dewan Direksi (nilai sig. 0,011 < 0,05), yang berarti ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE). Hal ini mendukung penelitian dari Setiawati (2012) dan Nugroho dan Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan

direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE). Jadi semakin banyak anggota Dewan Direksi, akan membuat lebih banyak jaringan dengan pihak *eksternal* perusahaan akan menjadi lebih baik. Namun penelitian memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gil dan Obradovich (2012) dimana jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Jadi idealnya tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan (Wardhani, 2006).

Hipotesis ketiga adalah ukuran Dewan Komisaris. Dari tabel 4 ditunjukkan nilai sig. DK $0,000 < 0,05$, yang berarti ukuran Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE). Namun dilihat dari nilai B menunjukkan angka negatif, sehingga dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang diajukan yang menyatakan kenaikan dewan komisaris meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini di mungkinkan karena dengan peningkatan dewan komisaris justru membuat pemikiran yang beragam sehingga tidak efektif peran kerjanya, sehingga menurunkan kinerja perusahaan. Idealnya untuk dewan komisaris menurut Undang - Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 3 yang menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris terdiri atas 1 orang atau lebih, dan pada ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota dewan komisaris.

Kemudian untuk hipotesis keempat adalah ukuran Komite Audit. Untuk nilai sig. Komite Audit $0,476$ lebih besar dari tingkat kesalahan $0,05$, sehingga hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis 4 yang diajukan . Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel ROE. Hal ini dimungkinkan tidak akan efektif peran kerja dari komite audit jika jumlah personil semakin banyak atau dengan jumlah komite audit yang sedikit akan memberikan pengendalian internal yang lebih baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Idealnya menurut Undang -Undang Republik Indonesia no. 19 tahun 2003 (bagi BUMN) serta keputusan ketua Bapepam No: Kep-41/PM/2003 (bagi perusahaan publik) menyatakan komite audit sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai seorang

komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang eksternal yang independen serta memiliki dan menguasai latar belakang akuntansi keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tanggung jawab sosial (CSR), ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit terhadap kinerja perusahaan (ROE) pada perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI periode 2013-2015. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan CSR dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (ROE). Sementara, untuk ukuran dewan komisaris memiliki dampak negatif pada kinerja perusahaan (ROE). Kemudian untuk Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

IMPLIKASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan sebaiknya meningkatkan kegiatan CSR dan jumlah dewan direksi, serta menurunkan ukuran dewan komisaris yang disesuaikan karakteristik perusahaan yaitu sesuai pedoman Undang - Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 3 menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris terdiri atas 1 orang atau lebih, dan pada ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota Dewan Komisaris. Bagi investor sebaiknya dalam berinvestasi mencermati perusahaan yang banyak melakukan kegiatan CSR dan ukuran dewan direksinya besar. Namun untuk kenaikan dewan direksi menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan atau pedoman Undang - Undang Perseroan Terbatas no.40 pasal 92 ayat 3-4. Jadi kenaikannya dibatasi karena jika melebihi aturan atau tidak menyesuaikan karakteristik perusahaan dimungkinkan adanya ketidakefektifan

kinerja dari dewan direksi. Investor juga perlu mencermati perusahaan yang ukuran dewan komisarisnya kecil atau sesuai Undang – Undang Perseroan Terbatas.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengungkapan CSR masih bersifat subyektif sehingga terjadi perbedaan dalam menginterpretasikan pengungkapan CSR dengan pedoman G4. Kemudian jumlah perusahaan pertambangan yang diteliti kurang dari setengah dari jumlah perusahaan pertambangan yang ada (karena tidak melaporkan laporan tahunan dan terjadi kerugian) sehingga harus menggunakan data 3 periode dengan perusahaan yang sama. Pengungkapan CSR masih secara global, tidak mengerucut perkategori sehingga tidak diketahui dalam kategori apa yang tidak banyak diungkapkan. Atas dasar keterbatasan tersebut maka penelitian selanjutnya disarankan:

- a. Pengungkapan CSR dilakukan secara obyektif, di teliti oleh peneliti lain dan disesuaikan dengan pedoman GRI sehingga lebih akurat data yang diperoleh dan penelitian menjadi lebih valid.
- b. Penggunaan perusahaan yang melaporkan *annual report* dan tidak mengalami kerugian lebih banyak dari setengah dari jumlah total perusahaan sehingga dapat mengetahui pengaruh dalam tiap periode.
- c. Pengungkapan CSR dilakukan perkategori sehingga bisa diketahui kategori yang tidak diungkapkan oleh perusahaan.